

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory pada penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Yang mana teori *stewardship* menggambarkan tentang keadaan di mana pemerintah (*stewards*) lebih termotivasi untuk kepentingan organisasi daripada tujuan-tujuan individu (Rohman et al., 2020). Teori tersebut mengasumsikan bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana seseorang bekerja bukan hanya untuk memaksimalkan nilai guna (*utility*) pribadinya, tetapi mereka dapat lebih bertanggungjawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi dan dengan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Maksimalisasi utilitas kelompok menggambarkan kesuksesan organisasi yang pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan personal yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Fadilah, 2020).

Teori *stewardship* merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya. Konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), dan saling percaya dan pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan ini. Membentuk sikap yang mengarahkan pada teori *stewardship* sebagai salah satu pendekatan dalam pengelolaan organisasi diharapkan dapat mengatasi isu-isu yang berhubungan dengan pemerintahan (Pasoloran dan Rahman, 2019).

Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah (*stewards*) yang mengelola sumberdaya dan masyarakat (*principal*) sebagai pemilik. Pemerintah sebagai *steward* memiliki tugas melayani publik dan juga mesejahterakan masyarakat (Murwaningsari, 2009). Dengan demikian penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan kondisi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dapat menyerap aspirasi masyarakat, serta mampu membuat pertanggungjawaban untuk pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanahkan kepadanya, sehingga dapat tercapainya tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Indrayani, 2019).

Posisi pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, hal ini terkait dengan memberikan pertanggungjawaban masalah keuangan sesuai dengan tugas yang telah diberikan, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan kepada publik, serta kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan baik (Nancy, 2021).

Teori *Stewardship* atau teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai *Steward* (pelayanan/penerima amanah/manajemen) sebab bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi Teori *Stewardship* terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa *stewardship* (manajemen) akan mengalokasikan sumber daya dana serta strategi yang

diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik (Donaldson dan Davis, 1991).

1.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kualitas merupakan suatu tingkat baik buruknya sesuatu dan derajat atau taraf (Launtu, 2021).

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (IAI, 2015). Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK (IAI, 2015).

Dari pemahaman diatas, dapat dipahami bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap kondisi entitas. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan pemerintah dalam suatu periode dan entitas pelaporan yang disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku (Apriansyah, et al 2020). Dalam penelitian ini menurut PP No.71 Tahun 2010 untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah, indikator yang digunakan yaitu, diantaranya:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dinyatakan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Hainil et al., 2021).

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat berpotensi menyesatkan (Hainil et al., 2021).

3. Dapat di bandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dibuat ketika entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (Hainil et al., 2021).

4. Dapat di pahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Hainil et al., 2021).

1.1.3 Kompetensi Sumberdaya Manusia

Menurut (Perka No 7 Tahun 2013) kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Pada hakikatnya sumberdaya manusia adalah individu produktif yang diperkerjakan di sebuah organisasi atau institusi sebagai penggerak, pemikir dan perencana yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dikelola, dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi (Nancy, 2021).

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumberdaya manusia yang tidak memiliki

kompetensi di dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di setiap bidang pekerjaan, begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkompeten (Apriansyah et al., 2020).

Sumberdaya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumberdaya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan (Apriansyah et al., 2020). Sumberdaya yang berkualitas dan berkompeten dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat menghasilkan sistem internal yang baik maupun yang efektif. Latar belakang pendidikan yang sesuai, contohnya penyusunan laporan keuangan haruslah dari pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi. Sehingga, sumber daya manusia tersebut dapat berpikir secara akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut (Hainil et al., 2021).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumberdaya manusia yaitu menurut (Wibowo, 2017:110), diantaranya:

1. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan akal, pikiran, ide serta kreativitas dalam melakukan, mengubah atau juga membuat sesuatu menjadi lebih bermakna. Sehingga dari hal tersebut dapat menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut (Oktavia & Rahayu, 2019).

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam mengukur keterampilan dengan cara yang benar-benar dipergunakan dalam pekerjaan. Pengetahuan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pegawai, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan (Oktavia & Rahayu, 2019).

3. Kemampuan (*liability*)

Kemampuan adalah suatu hasil (*output*) yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Oktavia & Rahayu, 2019).

1.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2015). Sedangkan (Mathis dan Jackson dalam Sopiah 2008:155) mendefinisikan komitmen organisasi

sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan dorongan dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu (Arif, 2017). Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pekerja akan mampu mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan (Saifudin dan Rizki, 2020).

Ada tiga jenis indikator yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut (Wibowo, 2017:215). Tiga indikator tersebut adalah :

1. Komitmen Afektif (*affective commitment*)

Komitmen afektif, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri kunci dari komitmen ini (*want to*) (Tampubolon dan Basid, 2019).

2. Komitmen Berkelanjutan (*continuance commitment*)

Komitmen berkelanjutan adalah suatu komitmen yang didasarkan pada kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi yang menjadi pertimbangan atas apa yang harus dikorbankan jika akan bertahan pada suatu organisasi. Kunci dari

komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (*need to*) (Tampubolon dan Basid, 2019).

3. Komitmen Normatif (*normative commitment*)

Komitmen normatif adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (*ought to*) (Tampubolon dan Basid, 2019).

1.1.5 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* pemerintah antara lain: investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Arza et al., 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2020), standar akuntansi pemerintahan merupakan standar akuntansi yang digunakan dalam mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholder* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan

akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah terdiri dari beberapa indikator standar yaitu:

1. SAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan (Hainil, et al 2021).

2. SAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit - LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (Hainil, et al 2021).

3. SAP 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Hainil, et al 2021).

4. SAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas

suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (Hainil, et al 2021).

5. SAP 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak milik berpindah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal (Hainil, et al 2021).

6. SAP 06 Akuntansi Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa mendatang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan (Hainil, et al 2021).

7. SAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah tanah, mesin, bangunan, peralatan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dikatakan aset tetap maka harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12

bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas diperoleh dengan maksud digunakan (Hainil, et al 2021).

8. SAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses pembangunannya membutuhkan waktu tertentu dan belum selesai (Hainil, et al 2021).

9. SAP 09 Akuntansi Kewajiban

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal (Hainil, et al 2021).

10. SAP 10 Koreksi kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun tidak,

dilakukan pembedaan pada akun yang bersangkutan pada periode berjalan (Hainil, et al 2021).

11. SAP 11 Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Hainil, et al 2021).

12. SAP 12 Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam laporan operasional adalah pendapatan-laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa (Hainil, et al 2021).

Informasi akan dikatakan bermanfaat bila informasi tersebut dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakainya.

1.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan

memanipulasi data. Berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan (Rusman, 2011:83). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya teknologi sangat penting. Manfaat teknologi informasi yaitu untuk menunjang kehidupan manusia yang lebih baik karena dengan adanya teknologi informasi bisa membantu kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien (<https://teknologi.id>, 05 Oktober 2021)

Peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menyatakan bahwa pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dan serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Rahman, 2017).

Terdapat dua jenis indikator untuk mengukur variabel teknologi informasi menurut (Tjhai, 2003), yaitu sebagai berikut:

A. Pemanfaatan komputer

Minat (*intention*) atau Intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi sistem informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi.

B. Pemanfaatan jaringan internet

Dengan pemanfaatan jaringan internet kita dapat bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berada di tempat yang sama. Hal ini dimungkinkan karena kita dapat menggunakan data secara bersama dan juga saling tukar - menukar data.

1.1.7 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang berkesinambungan (*sustainable*) pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dalam penyusunannya, PP No. 60 Tahun 2008 sebenarnya merupakan hasil adaptasi dan konsep *internal control* yang telah direkomendasikan oleh *The Committee of Sponsoring Organization*

(COSO) pada tahun 1992. Sistem pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO adalah suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (Effendi, 2016:27).

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti dalam undang-undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan (Hainil et al., 2021).

Menurut COSO terdapat 5 indikator sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan (Jaya, 2021).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan (Jaya, 2021).

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan (Jaya, 2021).

4. Informasi dan Komunikasi

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber

internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi (Jaya, 2021).

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi (Jaya, 2021).

1.2 Tinjauan penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Oktavia dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Hal itu di dukung oleh penelitian Tampubolon dan Basid (2019) dan Laitera et al (2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Setyowati (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal itu didukung oleh penelitian Tampubolon dan Basid (2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Launtu (2021) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Hal itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Meisy dan Erinoss (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Siregar (2020) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laitera et al (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman et al (2020) dan Tampubolon dan Basid (2019) yang menyatakan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Hainil et al (2021) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laitera et al (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	<p>Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Gusdan Yaffie Danang Jaya (2021)</p>	<p>X1: Kompetensi Sumberdaya Manusia X2: Sistem Pengendalian Intern X3: Standar Akuntansi Pemerintah X4: Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan</p>
2.	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>2. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh</p>

	Harry Apriansyah, Sri Rahayu dan Misni Erwati (2020)		terhadap kualitas laporan keuangan
3.	Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Susri Hainil, Bakkareng, dan Dica Lady Silvera (2021)	X1: Kualitas Sumberdaya Manusia Bidang Akuntansi X2: Sistem Pengendalian Internal Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4.	Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Frasca Ardy Nugroho dan Widhy Setyowati (2019)	X1: Komitmen Organisasi X2: Sistem Informasi Akuntansi X3: Peran Audit Internal Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Komitmen Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Pengaruh Kompetensi Sumberya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi	X1: Kompetensi Sumberdaya Manusia X2: Komitmen Organisasi	1. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah keuangan

	Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Shintami Oktavia dan Sri Rahayu (2019)	X3: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	pemerintah daerah. 2. Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Pengaruh Sumberdaya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Abdul Rohman, Agus Ismaya, dan Tri Lestari (2020)	X1: Sumber Daya Manusia X2: Standar Akuntansi Pemerintahan X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi X4: Pengendalian Intern X5: Komitmen Organisasi Y: Kualitas Lapooran Keuangan Daerah	1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 3. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 4. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
7.	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas	X1: Komitmen Organisasi X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Fitri Mariana Tampubolon dan Ahmad Basid (2020)	Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ansir Launtu (2021)	X1: Kualitas Sumberdaya Manusia X2: Penerapan Stanadar Akuntansi Pemerintah Y: Kulitas laporan Keuangan Pemerintah	1. Kualitas Sumberdaya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 2. Penerapan Stanadar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah
9.	Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Meisy Hendri dan Erinos NR (2020)	X1: Kualitas Sumber Daya Manusia X2: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah X3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Y: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah
10.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem	X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah X2: Sistem Informasi	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan

	Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Siti Hasanah dan Tapi Rumondang Sari Siregar (2020)	Akuntansi X3: Sistem Pengendalian Intern X4: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Kualitas Laporan Keuangan	keuangan 2. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
11.	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Fredrik Laitera, N. Ahuluheluw, dan M. Fadila Laitupa	X1: Sistem akuntansi keuangan daerah X2: Kompetensi sumber daya manusia, X3: Sistem pengendalian intern X4: Pemanfaatan teknologi informasi Y: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah
12.	Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan	X1: Komitmen Organisasi Pemerintah X2: Pelaksanaan	1. Komitmen Organisasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

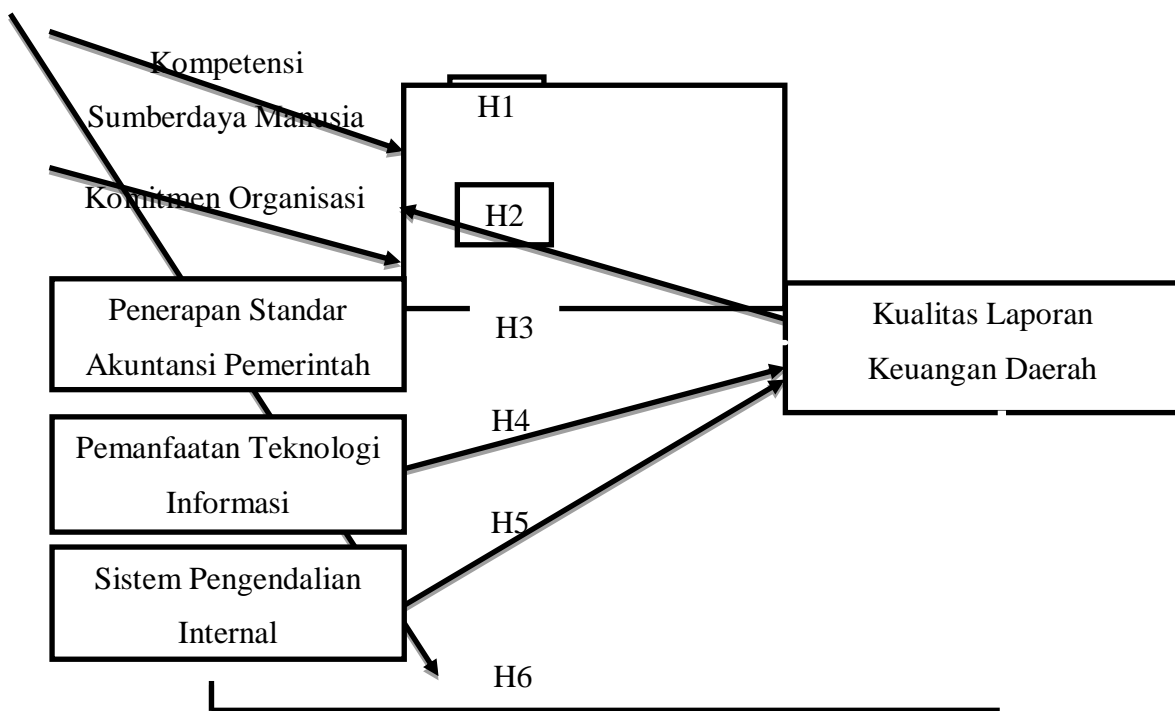
	<p>Anggaran dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor)</p> <p>Hernanda Luky, Trihandarau Setiyawati dan Hari (2020)</p>	<p>anggaran,</p> <p>X3: Implementasi Sistem Informasi Akuntansi</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor)</p>	<p>keuangan</p>
13.	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya</p> <p>(Leiwakabessy, 2020)</p>	<p>X1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</p> <p>X2: Kompetensi Sumberdaya Manusia,</p> <p>X3: Sistem Informasi Akuntansi</p> <p>Y: Kualitas Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya</p>	<p>1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Proses Pelaporan Keuangan</p> <p>2. Kompetensi Sumberdaya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Proses Pelaporan Keuangan</p>
14.	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern,</p>	<p>X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,</p> <p>X2: Sistem Pengendalian Intern,</p>	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>

	<p>dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem</p> <p>(Ni Komang Ayu Mahartiini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, 2020)</p>	<p>X3: Sistem Informasi Akuntansi</p> <p>Y: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>2. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>
--	---	---	---

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti



1.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Stewardship theory bermula dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. *Stewardship theory* muncul bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan bekerja sama. Pada entitas pemerintahan untuk menghasilkan

laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkompeten. Berkaitan dengan teori *steward* maka manajemen pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang dimilikinya (Apriansyah, et al 2020).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Untuk mengurangi konflik tersebut maka perlu adanya kompetensi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan konflik tersebut bisa teratasi (Irafah, et al 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Oktavia dan Rahayu (2019) yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal itu di dukung oleh penelitian Tampubolon dan Basid (2019) dan Laitera et al (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan teori steward dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4.2 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pada *theory steward* menjelaskan adanya keterkaitan antara bagaimana kinerja individu terhadap tujuannya dan harus bertanggungjawab atas tugas-tugasnya. Kinerja setiap individu tentunya akan dipengaruhi oleh seberapa besar komitmennya terhadap organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan bersama dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan, agar terhindar dari adanya kesalahan input dan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini berarti, bahwa setiap individu memiliki komitmen pada organisasinya, maka pegawai tersebut akan memaksimalkan kemampuannya yang diberikan kepada organisasi ditempatnya bekerja (Nugroho dan Setyowati, 2019).

Hubungan pemerintah (*steward*) merupakan suatu kesatuan dimana masyarakat (prinsipal) memerintah orang lain (pemerintah) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang untuk membuat keputusan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban bagi pemerintah dengan memberikan pelaporan keuangan dan segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan responsif kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan

pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya (Rohman, et al 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Nugroho dan Setyowati (2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Tampubolon dan Basid (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori steward dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4.3 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan pada instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam membuat dan menyajikan akuntansi pemerintah. Berkaitan dalam teori steward dapat menjelaskan posisi Pemerintah Daerah sebagai sebuah lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, untuk melakukan tugas tersebut maka pemerintah (*steward*) dapat mengarahkan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk melakukan pengendalian sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan PSAP (Aprianysah, et al 2020).

Hubungan *steward* dengan penerapan standar akuntansi pemerintah adalah bahwa pemerintah berhak dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai. Oleh karena itu dengan adanya standar ini, dapat diharapkan bahwa laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga terciptanya pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, transparan dan akuntabel (Yusriani, 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Launtu (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian Meisy dan Erinos (2020) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan teori *steward* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4.4 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pemanfaatan TI yang baik tentunya akan berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan, baik itu dilihat dari segi minimnya kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Apabila terdapat sistem yang bisa diandalkan, maka dalam proses pengolahan data (input) sampai dengan luaran informasi (output) yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan setiap keputusan secara tepat. Berkaitan dengan teori *steward* dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan modern tentunya dapat memberikan kemudahan kepada organisasi dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan mengenai laporan keuangan kepada *principal* (masyarakat) (Susena dan Supadmi, 2020). Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan maka percepatan penyampaian informasi keuangan dalam pelaporannya diperlukan adanya teknologi yang memadai, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Susena dan Supadmi, 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Laitera et al (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian Saifudin dan Rizki (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori

steward dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4.5 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Rohman et al., 2020). Laporan keuangan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Teori *steward* mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan principal adalah terintegrasi, artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik, yaitu organisasi (Jaya, 2021). Dalam konteks ini, maka pemerintah daerah akan terus membangun sistem yang berkualitas untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga diperlukan adanya evaluasi secara keseluruhan. Dengan adanya aturan yang ketat serta kebijakan yang mengarah dapat diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan (Jaya, 2021)

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah perlu menerapkan sistem pengendalian internal pada lingkungan masing-masing. Sistem pengendalian internal dilaksanakan untuk memberikan keyakinan atau efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keterandalan laporan keuangan yang disajikan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap

perundang-undangan. Pengendalian internal berperan penting dalam pencegahan *fraud* (penggelapan) dan melindungi sumberdaya organisasi. Dengan demikian pengendalian internal di lingkungan pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rohman, et al 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Jaya (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Hainil et al (2021) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori steward dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H5: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4.6 Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, serta aset yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah diantaranya kompetensi, dengan adanya kompetensi yang dimiliki pegawai maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan Laitera et

al (2021). Komitmen organisasi merupakan dorongan dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu (Arif, 2017). Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Ariyanto (2020). Pemanfaatan teknologi merupakan cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan (Rusman, 2011:83). Sistem pengendalian internal merupakan proses yang berkesinambungan (*sustainable*) pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (Hainil et al., 2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Kompetensi Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

